PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora
Vol.5, No.6, Oktober 2026

Efektivitas Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pada Layanan Bus Trans Jatim di Rute Sidoarjo Surabaya Gresik

Reza Fahrur Marfiati[1], Rosyidatuzzahro Anisykurlillah[2]
[1,2] Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia
E-mail: Rezafahrurmarfiati@gmail.com

Article History:
Received: 06 Juli 2026
Revised: 20 September 2026
Accepted: 04 Oktober 2026

Keywords: *Standar Pelayanan Minimal, Trans Jatim, Transportasi Publik*

Abstract: *Penelitian ini mengkaji efektivitas penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada layanan Bus Trans Jatim di rute Sidoarjo Surabaya Gresik). Latar belakang penelitian ini adalah belum meratanya kualitas layanan transportasi publik di Jawa Timur, khususnya pada aspek keteraturan, kenyamanan, dan kesetaraan layanan bagi penumpang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam dengan pejabat Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur dan penumpang Bus Trans Jatim, observasi lapangan, serta studi dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui model Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemenuhan SPM Koridor 1 mencapai pemenuhan tertinggi dengan rata-rata 79%.*

PENDAHULUAN

Transportasi publik merupakan salah satu pilar fundamental dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), khususnya dalam dimensi pelayanan publik. Negara berkewajiban menyediakan layanan transportasi yang tidak hanya terjangkau, tetapi juga aman, nyaman, dan dapat diandalkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Di Indonesia, kewajiban tersebut secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mengamanatkan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan angkutan umum perkotaan yang memenuhi standar kualitas tertentu.

Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu provinsi dengan kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia menghadapi tantangan serius dalam penyediaan layanan transportasi publik yang memadai. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Jawa Timur (2023), jumlah penduduk Jawa Timur mencapai 40,67 juta jiwa, dengan konsentrasi populasi tertinggi di kawasan metropolitan Surabaya yang mencakup Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Mojokerto. Kawasan ini, yang dikenal sebagai Gerbangkertosusilo, menjadi koridor mobilitas utama dengan kebutuhan transportasi yang masif dan belum sepenuhnya terlayani oleh sistem transportasi publik yang memadai. Akibat adanya peningkatan kualitas hidup di wilayah perkotaan disebabkan oleh faktor ekonomi yang mengundang orang-orang untuk bermigrasi ke Kota Surabaya sehingga tingkat urbanisasi dan laju pertumbuhan penduduk kota Surabaya meningkat (Nurdiana & Wahyudi, 2023).

Salah satu strategi yang dilakukan oleh pemerintah yaitu mengandalkan angkutan umum sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan mobilitas (Lutfiah et al., 2026). Mobilitas menggunakan transportasi umum akan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, transportasi juga sangat penting dalam mencapai tujuan kehidupan masyarakat dan pembangunan ekonomi karena transportasi menunjang kegiatan masyarakat untuk berpindah dari tempat asal hingga tujuan (Hendrialdi et al., 2021). Menurut Alimuddin dalam Wulandari & Sudiana (2018) tanpa adanya transportasi yang memadai maka pembangunan pada segala bidang akan terhambat, sehingga sektor transportasi dapat dikatakan sebagai *derived demand* artinya sektor transportasi yang bertambah karena dibutuhkan untuk melayani masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Banyak penemuan terkait transportasi yang telah dikembangkan secara efektif, dan sebagai hasilnya kemajuan teknologi dan peningkatan infrastruktur transportasi telah meningkatkan kesejahteraan umat manusia (Safira & Khuluqi, 2023). Untuk mengatasi permasalahan lalu lintas diperlukan perencanaan sistem transportasi yang efektif (Azali et al., 2018).

Maka dari itu, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur meluncurkan Bus Trans Jatim. Peluncuran dan operasional Bus Trans Jatim didasari oleh peraturan teknis dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kebijakan mengenai tarif operasional diatur dalaam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 21 Tahun 2023 tentang Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Penumpang Antarkota Dalam Wilayah Provinsi Jawa Timur yang menggunakan Bus Umum. Selain itu, Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2013 terkait Tataran Transportasi Wilayah Jawa Timur Tahun 2012-2032, Dinas Perhubungan Jawa Timur meluncurkan Bus Trans Jatim sebagai layanan transportasi publik berupa Bus Rapid Transit (BRT) yang beroperasi pada jaringan antarkota maupun antar kabupaten dalam satu kawasan.

Penelitian efektivitas penerapan Standar Penerapan Minimal pada layanan BRT di Indonesia masih terbatas, terutama menggunakan pendekatan kualitatif. Sebagain besar penelitian terdahulu menggunakan indiator kualitas layanan yang bersifat umum, seperti dimensi SERQUAL atau penilaian kepuasan pengguna seperti penelitian (Kasiani & Widiyarta, 2023) sehingga belum secara langsung mengacu pada indikator resmi seperti Standar Pelayanan Minimal sebagaimana ditetapkan dalam regulasi Kementerian Perhubungan, misalnya melalui Permenhub Nomor 27 Tahun 2015. Padahal, SPM merupakan standar formal yang wajib digunakan sebagai tolok ukur penilaian kualitas pelayanan angkutan umum. Dengan demikian, evaluasi berdasarkan indikator SPM masih jarang dilakukan dalam konteks layanan Bus Trans Jatim.

Selain itu, penelitian yang ada pada umumnya hanya menilai tingkat kepuasan atau kinerja pelayanan seperti penelitian dari (Juliati & Ayunaning, 2024), namun belum banyak yang mengkaji kesenjangan antara standar layanan yang ditetapkan melalui SPM dengan persepsi serta pengalaman langsung yang dirasakan pengguna Bus Trans Jatim. Analisis mengenai kesenjangan ini penting untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas penerapan SPM secara nyata. Kondisi ini memperlihatkan adanya kebutuhan penelitian yang secara komprehensif menilai efektivitas SPM pada layanan Bus Trans Jatim.

LANDASAN TEORI

Efektivitas

Efektivitas merupakan kunci utama organisasi untuk mencapai target yang telah ditetapkan (Alfarizi et al., 2025). Mahmudi dalam (Korengkeng et al., 2023) menyatakan bahwa tingkat

efektivitas suatu organisasi atau program ditentukan oleh keselaran hasil nyata (output) dengan sasaran yang ingin dicapai. Semakin besar peranan output tersebut dalam mempermudah pecapaian tujuan, maka tingkat efektivitasnya akan dinilai semakin tinggi.

Menurut Gibson dkk (2000), tolak ukur utama dari efektivitas adalah sejauh mana target awal berhasil direalisasikan. Hal ini sejalan dengan pandangan Peter Drucker dalam (Martauli et al., 2022) menekankan bahwa efektivitas berfokus pada ketepatan dalam memilih dan melakukan tindakan yang benar (doing the right things) demi mencapai sasaran tersebut. Efektivitas berfokus pada hasil akhir yang menggambarkan sejauh mana target dapat terealisasi dengan standar kualitas yang memadai (Erwinda & Firdaus, 2025). Oleh karena itu menurut Siagian dalam (Faradiba et al., 2021) menjelaskan bahwa tingkat efektivitas suatu kegiatan akan semakin tinggi apabila hasil akhir yang didapatkan mampu mendekati atau memenuhi target yang sudah ditetapkan sejak awal menggunakan sumber daya yang ada.

Pelayanan Publik

Menurut R.A Supriyono dalam Hartono et al. (2023) Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan bisnis sebagai respons terhadap kebutuhan pelanggan dan meninggalkan kesan mendalam. Jika mereka mendapat pelayanan prima, mereka akan senang, oleh karena itu pelayanan sangat penting agar mereka mau menggunakan barang dan jasa yang disediakan. Pelayanan publik adalah pemberian pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan norma dan prosedur yang berlaku. Menurut Sinambela dalam Along (2020) Pelayanan publik adalah segala tindakan yang dilakukan pemerintah yang bermanfaat bagi masyarakat dan membahagiakan masyarakat, meskipun hasilnya tidak ada hubungannya dengan harta benda. Pelayanan publik adalah pemberian pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memenuhi kebutuhan orang atau komunitas yang berkepentingan terhadap suatu organisasi (Haqie et al., 2020).

Standar Pelayanan Minimal

Standar pelayanan digunakan sebagai pedoman pemberian pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, pedoman penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban, dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik menetapkan bahwa semua penyedia layanan dan perseorangan harus diinformasikan saat memberikan pelayanan dengan memperhatikan komponen-komponen standar pelayanan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa Standar Pelayanan Minimal yang disebut juga SPM adalah persyaratan minimum terhadap jenis dan kualitas pelayanan dasar yang menjadi urusan negara dan berhak diterima oleh setiap warga negara. Dari segi input, proses, output, dan manfaat pelayanan, SPM merupakan standar kinerja kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk mencirikan cakupan target yang harus dipenuhi dalam rangka mencapai SPM tertentu. Jumlah dan mutu barang atau jasa yang memenuhi kebutuhan dasar serta jumlah minimal pelayanan dasar yang harus disediakan sesuai dengan standar jenis agar dapat diukur sebagai mutu pelayanan dasar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tujuan menghasilkan pemahaman mendalam mengenai fenomena yang diteliti melalui fakta yang ditemukan di lapangan. Pendekatan deskriptif dipilih karena data penelitian berbentuk tuturan, tulisan, serta perilaku yang diamati, sehingga dapat menyajikan deskripsi dan analisis yang sesuai dengan kondisi empiris. Metode ini digunakan untuk mengetahui efektivitas penerapan standar pelayanan minimal pada

layanan Bus Trans Jatim rute Sidoarjo Surabaya Gresik dengan menelaah persepsi, pengalaman, dan tanggapan para pemangku kepentingan terkait. Data primer dikumpulkan melalui wawancara terhadap penumpang, staf angkutan jalan, dan Staf Koordinator Trans Jatim, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur penelitian relevan. Evaluasi ini diharapkan mampu memberikan pemahaman menyeluruh mengenai pelaksanaan program, mendeskripsikan aspek yang telah berjalan baik maupun yang masih membutuhkan perbaikan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan bagi pengembangan transportasi publik di masa mendatang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pencapain Tujuan

Tujuan utama adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Bus Trans Jatim adalah untuk menjamin kualitas, kuantitas, dan pemerataan pelayanan transportasi publik yang aman, nyaman dan terjangkau bagi masyarakat jawa timur. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengamanatkan bahwa pemerintah wajib menyelenggarakan dan menyediakan pelayanan angkutan umum yang aman, nyaman, dan terjangkau. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerjemahkan perintah undang undang tersebut dalam bentuk Bus Trans Jatim dengan SPM sebagai instrumen pengukur kualitas layanan publik agar akuntabel. Hal ini juga diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2015 yang mengatur tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek yang mencakup indikator keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan, dan keteraturan demi melindungi hak-hak dasar penumpang selaku konsumen angkutan umum. Standar Pelayanan Minimal (SPM) wajib diterapkan oleh Pemerintah Provinsi melalui Dinas Perhubungan untuk memastikan pelayanan angkutan umum yang berkualitas. Dengan adanya penerapan Standar Pelayanan Minimal pada Bus Trans Jatim ini membawa dampak positif dalam transportasi publik yaitu masyarakat mulai memanfaaatkan Bus Trans Jatim sebagai alternatif mobilisasi, terlihat dari peningkatan jumlah pengguna Bus Trans Tatim.

Tabel 1 Rekapitulasi Jumlah Penumpang Tahun 2023-2025

	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
KORIDOR I	**1,669,650**	**2,256,146**	**2,279,307 (Jan-Okt)**

Sumber: Rekapitulasi penumpang, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah penumpang koridor I setiap tahunnya, yaitu pada tahun 2023 berjumlah 1,669,650 penumpang, tahun 2024 berjumlah 2,256,146 penumpang dan pada tahun 2025 bertambah menjadi 2,279,307 penumpang. Selain dengan meningkatnya jumlah penumpang, faktor kualitas pelayanan juga menentukan keberhasilan dari penelitian ini. Faktor kepuasan penumpang juga harus menjadi penentu berhasil tidaknya layanan yang telah disediakan oleh pemerintah. Maka dari itu, penulis mencari informasi berupa data tentang kepuasan pengguna Bus Trans Jatim melalui SuKMa-e Jatim. Survei Kepuasan Masyarakat Secara Elektronik Jawa Timur atau SuKMae Jatim adalah sistem yang mengukur Tingkat Kepuasan Masyarakat sebagai pengguna layanan publik berbasis QR Code secara akuntabel, mudah, cepat dan terintegrasi.

Gambar 1 Hasil Survei Kepuasan Msyarakat (SKM) Dinas Perhubungan Provinsi Jatim

Nilai IKM	93.25
Unsur Penilaian	Pelayanan Transjatim Koridor I
Persyaratan Pelayanan (U1)	79.26
Prosedur Pelayanan (U2)	83.33
Waktu Pelayanan (U3)	71.71
Biaya/Tarif Pelayanan (U4)	77.91
Produk Spesifikasi Pelayanan (U5)	78.29
Kompetensi Pelaksana Pelayanan (U6)	80.62
Perilaku Pelaksana Pelayanan (U7)	81.01
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan (U8)	81.78
Sarana dan Prasarana Terminal (U9)	68.60
Transparansi Pelayanan (U10)	75.78
Integritas Petugas Pelayanan (U11)	83.33
Nilai IKM	77.50

Sumber: Laporan Survei Kepuasan Masyarakat 2025

Berdasarkan Tabel di atas rata-rata indeks kepuasan masyarakat (IKM) Koridor I berpredikat B atau Baik dalam rentang 76,61 – 88,30 dengan IKM 77,50. Hal ini menunjukkan bahwa telah terwujudnya pelayanan yang berkualitas sesuai standar pelayanan.

Integrasi

Kemampuan untuk menjalankan operasional yang telah disepakati sesuai dengan prosedur serta mengadakan sosialisasi. Hal ini mencakup koordinasi antara Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur sebagai regulator, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagai pengelola operasional, operator swasta yang bermitra dalam penyedia armada dan sopir, serta masyarakat pengguna sebagai penerima manfaat. Koordinasi antara Dinas Perhubungan dengan operator armada telah berjalan dengan landasan perjanjian kerjasama yang formal dan tertulis. Mekanisme pengawasan melalui tim monitoring lapangan juga telah dibentuk dan aktif melakukan pengecekan rutin.

Gambar 2 Pelatihan Petugas Bus Trans Jatim



Sumber: Instagram @officialtransjatim

Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur telah melakukan Pelatihan Sumber Daya Manusia bagi calon petugas operasional Bus Trans Jatim yang baru. Pelatihan ini berlangsung selama tiga hari yaitu mulai tanggal 24 hingga 26 September 2025. Pelatihan ini sebagai bekal wajib sebelum para petugas resmi bertugas melayani masyarakat. Kegiatan sosialiasasi, pelatihan, maupun pengembangan pegawai merupakan usaha pemerintah dalam meningkatkan kemampuan ataupun kinerja petugas agar dapat memberikan pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Adaptasi

Adaptasi yaitu kemampuan organisasi untuk merespons dan menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan, baik internal maupun eksternal. Dalam konteks penerapan Standar Pelayanan Minimal Bus Trans Jatim, adaptasi mencakup respons terhadap segala bentuk perubahan atau perkembangan yang terjadi seperti permintaan pengguna, perubahan regulasi, perkembangan teknologi, serta tantangan operasional yang muncul di lapangan.

Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur telah menunjukkan inisiatif adaptif. Penggunaan aplikasi berbasis digital untuk pembelian tiket dan pemantauan jadwal bus secara real-time merupakan contoh nyata adaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga relevan dengan perubahan perilaku masyarakat yang semakin terbiasa dengan penggunaan digital.

Gambar 3 Aplikasi Trans Jatim Ajaib



Sumber: Instagram @officialtransjatim

Aplikasi Transjatim-Ajaib 2.0 dilengkapi dengan berbagai fitur digital yang dirancang untuk mempermudah mobilitas penumpang. Fitur-fitur utama dalam aplikasi ini yaitu pembelian tiket, pelacakan posisi bus (live tracking), informasi rute dan jadwal,mengecek kapasitas penumpang, informasi halte terdekat, serta pengaduan pelanggan juga dapat melalui aplikasi ini.

KESIMPULAN

Penerapan SPM pada Bus Trans Jatim dinilai sangat efektif dalam mencapai target pemenuhan fasilitas teknis (keamanan, keselamatan) serta target kuantitas penumpang. Tingginya antusiasme masyarakat, terutama di Koridor I yang mengalami overload, menunjukkan keberhasilan tujuan pengalihan moda transportasi pribadi ke publik. Tingkat efektivitas integrasi menunjukkan hasil yang sangat baik melalui sinergi antara petugas dan penumpang. Petugas secara kooperatif menjalankan SOP, seperti pengaturan zonasi gender dan pengutamaan kursi prioritas. Selain itu, Bus Trans Jatim memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap dinamika lapangan dan perkembangan teknologi. Penggunaan aplikasi TransJatim Ajaib untuk pelacakan posisi bus secara real-time serta pemanfaatan media sosial (Instagram) dan grup koordinasi internal untuk penanganan kendala rute, membuktikan bahwa organisasi mampu merespons perubahan lingkungan dengan cepat guna menjaga kelangsungan layanan yang efektif. Secara keseluruhan, efektivitas Standar Pelayanan Minimal pada Bus Trans Jatim berdasarkan teori Duncan dalam Steers (1985) telah berjalan secara optimal. Meskipun indikator pencapaian tujuan menghadapi tantangan berupa kondisi *overload*, namun hal tersebut mampu diimbangi dengan aspek integrasi petugas yang disiplin serta kemampuan adaptasi teknologi yang mumpuni, sehingga layanan tetap dinilai efektif. Oleh karena itu disarankan Pemerintah Provinsi Jawa Timur disarankan untuk mengalokasikan anggaran yang memadai dalam APBD untuk peningkatan infrastruktur halte, terutama pada halte yang dinilai kurang nyaman dalam menunjang fasilitas angkutan Bus Trans Jatim.

DAFTAR REFERENSI

Alfarizi, M. A., Hasbullah, H., & Wulan, S. K. (2025). Analisis Efektivitas Pelayanan Publik Berbasis Aplikasi Layanan SIMAYANG di Perumdam Tirta Mayang Kota Jambi. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, *3*(3), 256–278.

Along, A. (2020). Kualitas Layanan Administrasi Akademik di Politeknik Negeri Pontianak. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, *6*(1), 94–99.

Azali, I., Gunanto, E. Y. A., & Nugroho. (2018). Preferensi Konsumen Terhadap Transportasi Publik (Studi Kasus Bus Rapid Transit (Brt) Kota Semarang). *Jurnal Media Ekonomi Dan Manajemen*, *33*(1), 86–98.

Erwinda, & Firdaus, M. R. (2025). Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Sosial di Kantor Kecamatan Halong Kabupaten Balangan. *Jurnal Administrasi Publik Dan Administrasi Bisnis*, *8*(1), 508–520.

Faradiba, S., Muchsin, S., & Hayat. (2021). Efektifitas Kinerja Pelayanan Sensus Penduduk Berbasis Online di Badan Pusat Statistik Kota Malang. *Jurnal Inovasi Penelitian*, *2*(1), 277–286.

Haqie, Z. A., Nadiah, R. E., & Ariyani, O. P. (2020). Inovasi Pelayanan Publik Suroboyo Bis di Kota Surabaya. *Inovasi Sektor Publik*, *05*(01), 23–30.

Hartono, C., Haryanto, A. T., & Purwanto Adi. (2023). *Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur Tahun 2022*. *12*(1), 29–41.

Hendrialdi, Sueni, N. W. P., Soimun, A., & Rupaka, A. P. G. (2021). Angkutan Massal Sebagai Alternatif Mengatasi Permasalahan Kemacetan Lalu Lintas Metropolitan Sarbagita. *Jurnal Teknologi Transportasi Dan Logistik*, *2*(2), 79–86.

Juliati, K., & Ayunaning, K. (2024). Evaluasi Kinerja Operasional Bus Trans Jatim Rute Bunder-Porong. In *Jurnal Teknik Sipil dan Lingkungan* (Vol. 01, Number 1). https://journal.umg.ac.id/index.php/jtsl

Kasiani, S., & Widiyarta, A. (2023). Persepsi Kualitas Pelayanan Bus Trans Jatim Koridor I (Sidoarjo-Surabaya-Gresik) Sebagai Transportasi Publik di Jawa Timur. *Jurnal Dinamika Pemerintahan*, *06*(02), 197–216.

Korengkeng, R. A., Tulusan, F. M. G., & Plangiten, N. N. (2023). Efektivitas Organisasi Pemerintah Kecamatan Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa. *Jurnal Administrasi Publik*, *9*(3), 318–327.

Lutfiah, Y. A., Estikhamah, F., & Utomo, N. (2026). Evaluasi Kinerja Operasional pada Bus Trans Jatim Koridor V Rute Surabaya - Bangkalan. *Jurnal Talenta Sipil*, *9*(1), 1–6. https://doi.org/10.33087/talentasipil.v9i1.1029

Martauli, H. S., Andri, Apriansah, D., Kamaludin, & Juriani, T. (2022). Efektivitas Pelaksanaan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK)*, *4*, 113–128.

Nurdiana, A. D., & Wahyudi, K. E. (2023). Efektivitas Suroboyo Bus dalam Mengatasi Kemacetan Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)*, *12*(3), 355–363. www.publikasi.unitri.ac.id

Safira, E., & Khuluqi, F. S. (2023). Analisis Tingkat Kemacetan dan Faktor Penyebab Kemacetan Lalu Lintas di Jalan Sultan HAMID II Kemacetan Pontianak Selatan. *Kajian Ilmu Dan Pendidikan*, *01*(01), 36–43.

Wulandari, N. P. C., & Sudiana, I. K. (2018). Analisis Tingkat Efektivitas Trans Sarbagita Sebagai Transportasi Publik Di Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* , *7*(11), 2490–2517.